

Transformasi peralihan kekuasaan dan kebijakan pemerintahan masa Khulafaur Rasyidin

Hilda Wahyuni

Program Studi Pascasarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: hildawahyuni2000@gmail.com

Kata Kunci:

Khulafaur Rasyidin;
peralihan kekuasaan;
kebijakan pemerintahan

Keywords:

Khulafaur Rasyidin; power
transition; government
policy

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan tentang transformasi peralihan kekuasaan dan kebijakan pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Fokus penelitian ini menggambarkan tentang perbedaan proses pengangkatan para Khulafaur Rasyidin dan bagaimana sistem kebijakan pemerintahan mereka. Hasil dari penelitian ini melihat beragamnya sistem peralihan kekuasaan dan kebijakan pemerintahan, yang pertama pada masa Abu Bakar dibaiat dengan keputusan para sahabat, ia juga memiliki kebijakan pemerintahan yang sentralistik hingga mampu memberantas kaum murtad. Kedua masa Umar ibn Khattab yang dipilih langsung oleh Abu Bakar, Umar memiliki prinsip demokratis dan menciptakan lembaga yang mengatur administrasi negara maupun hukum negara. Yang ketiga ialah Ustman bin Affan yang dipilih melalui musyawarah dan ia mampu membangun sistem hukum yang kuat dan menulis kembali Al-Quran. Keempat, ialah Ali bin Abi Thalib yang dibaiat secara massal, kebijakan pemerintahannya dengan memperbaiki pola pemerintahan negara dan menyusun arsip negara. Keseluruhan bentuk kebijakan pemerintahan Khulafaur Rasyidin sangatlah berpengaruh pada peradaban Islam, hingga Islam kini mampu berdiri tegak dan kokoh. Mereka adalah pemimpin yang sempurna dan harus diteladani dalam sistem pemerintahan. Kita berharap sistem pemerintahan Indonesia dapat mengikuti jejak mereka.

ABSTRACT

This study describes the changes in power transfer and government policy during Khulafaur Rasyidin's reign. The goal of this study is to describe the differences in Khulafaur Rasyidin's appointment process and governmental policy system. The study's findings examined the diversity of the power transfer system and the government's policies. During this period, Abu Bakar faced challenges from his friends' decisions and implemented a centralist government policy aimed at eliminating the murtad. On two occasions, Abu Bakar directly elected Umar ibn Khattab Yag, who upheld democratic principles and established institutions that regulated state administration and state law. The third is Ustman bin Affan, who was elected by the government and was able to build a strong legal system and rewrite the Quran. The fourth is Ali bin Abi Thalib, whose government policy was to improve the government pattern and compile the country's archives. The political forms of Khulafaur Rasyidin's government have greatly influenced Islamic civilization, enabling Islam to stand upright and firm today. They are ideal leaders who must be integrated into the government system. We hope the Indonesian government system will follow in their footsteps.

Pendahuluan

Proses transformasi peralihan kekuasaan ini dimulai setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw yang juga sebagai pemimpin umat Islam kala itu. Disisi lainnya, beliau



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

tidak meninggalkan pesan maupun informasi apapun mengenai siapa sahabat yang akan mengambil alih posisinya sebagai pemimpin umat setelah dirinya. Hingga terjadilah proses pemilihan pemimpin setelah Nabi Muhammad Saw wafat kala itu menjadi hal yang urgen di kalangan para sahabat bahkan lebih penting daripada pemakaman jenazahnya karena khawatir umat Islam akan terpecah belah, murtadnya umat muslim sebab dianggap bahwa sang penerima wahyu telah wafat maka terputus pula hubungan mereka dengan Allah. Hal ini lah yang mengakibatkan para sahabat segera mengambil tindakan dan mengangkat salah seorang diantara mereka untuk menggantikan Nabi sebagai kepala negara.

Transformasi peralihan kekuasaan ini pun bukan dibuat bukan dengan dasar keinginan para sahabat, namun hal ini juga didukung dengan sebuah pernyataan bahwa “*dulu urusan-urusan negara Bani Israil berada di tangan Nabi-nabi mereka dan ketika seorang Nabinya meninggal, maka pada masa yang akan datang akan ada khalifah setelahku dan jumlahnya adalah beberapa dari mereka.*” Lalu salah seorang bertanya lagi, apakah beliau akan memberikan perintah mengenai mereka? Nabi pun menjawab: “*Ambillah sumpah kesetiaan pada tangan dia yang terpilih pertama*” Hal tersebut menyatakan bahwa terdapat kalimat yang disampaikan Nabi mengenai dukungan pendapat terhadap untuk memilih pemimpin dari para sahabat, hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Nabi Muhammad Saw yaitu: “*Ikutilah sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terbimbing*” (Kadenun, 2021). Sehingga para pemimpin umat Islam usai sepeninggalan nabi jatuh kepada para sahabat nabi Muhammad Saw yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin.

Terjadi berbagai perdebatan untuk menentukan siapa pemimpin umat Islam usai wafatnya nabi kala itu. Hingga akhirnya, hadirlah pilihan pada empat sahabat yang menjadi Khulafaur Rasyidin sebagai pengganti Nabi Muhammad Saw. Mereka ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin.

Sebagian besar orang menganggap periode Khulafaur Rasyidin sebagai periode yang paling cemerlang dalam sejarah Islam sejak masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini, nilai-nilai Islam memiliki pengaruh yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Pada periode ini juga, ajaran Islam secara luas diterapkan (Abdullah, 2019). Banyaknya prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin untuk peradaban Islam, dan kita sebagai umat Islam harus belajar dari kemajuan yang telah dicapai para Khalifah untuk kemajuan agama kita. Adapun artikel ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana sistem penggantian Khalifah dan kebijakan pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin.

Pembahasan

Pengertian Khulafaur Rasyidin

Secara harfiah kata Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua suku kata yaitu khulafaur dan Rasyidin, Khulafaur atau khilafah berasal dari kata “*khalaf*” artinya wakil, pengganti, dan penguasa, sehingga membentuk kata “*khalifah*”, ialah orang yang menggantikan orang lain. Sedangkan kata Al-rasyidun berasal dari kata “*rasyada*” yaitu cerdas, jujur,

dan amanah. Dan jamaknya *rasyidun* ialah orang-orang yang cerdas, jujur, dan amanah (Aziz & Fatimah, 2018). Secara terminologi khalifah adalah jabatan keagamaan yang dipegang oleh penguasa tertinggi atau dapat dikatakan adalah seorang kepala negara.

Para pengganti Rasul yang cendekiawan inilah yang disebut Al-Khulafar Rasyidin. Jika Rasul bertanggung jawab atas kedua tugas kenabian dan negara, Khulafaur Rasyidin ditugaskan untuk memimpin negara, yaitu sebagai pemimpin negara atau pemerintahan, dan sebagai pemimpin umat Islam atau pemuka agama. Namun, karena Rasulullah merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang telah meninggal, para khalifah tidak dapat menggantikan jabatan kerasulan (Fahira Iramadhania et al., 2023).

Pemimpin umat Islam setelah kematian Nabi adalah Khulafaur Rasyidin. Pemimpin mereka dipilih langsung oleh para sahabat melalui proses demokratis. Sahabat yang lain memberikan baiat, atau sumpah setia, kepada calon yang terpilih. Ada dua cara pemilihan khalifah. Yang pertama adalah melalui musyawarah para sahabat Nabi; yang kedua adalah berdasarkan penunjukan khalifah sebelumnya (Zainudin, 2015).

Dapat disimpulkan khulafar rasyidin adalah penerus dalam memimpin umat Islam baik dalam urusan agama maupun kenegaraan. Dengan hadirnya khulafar rasyidin umat Islam dapat terayomi dengan sosok pemimpin yang adil dan dapat menjadi tauladan bagi seluruh umat Islam.

Transformasi Peralihan Kekuasaan Masa Khulafaur Rasyidin

Terjadinya peralihan kekuasaan ini mulai terjadi saat sepeninggalannya Nabi Muhammad SAW. Pada setiap masa pemilihan, para khulafa tidak dipilih atau diangkat dengan cara yang sama, tetapi melalui cara yang berbeda pula. Terdapat berbagai alasan dari adanya perbedaan sistem peralihan kekuasaan ini yang tentunya akan dijabarkan secara singkat dan mudah dipahami dalam pembahasan ini.

Pengangkatan Khalifah Abu Bakar

Setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw para pemuka Islam bermusyawarah untuk mencari pengganti Rasulullah Saw. Sementara jenazah Rasulullah masih terbaring, diumumkanlah berita pertemuan di Tsaqif yang dengan cepat mengumpulkan para pemuka Islam. Maka hadirlah Abu Bakar, Umar, Abu 'Ubaidah sebagai wakil dari kaum Muhajirin dan Kaum Anshar.

Pada pertemuan itu terjadilah musyawarah dua kelompok penting dalam kelahiran umat Islam yaitu golongan Muhajirin dan Anshar. Terjadilah perselisihan yang tidak dapat dielakkan. Golongan Khajraz telah bersepakat bahwa Salad bin Ubaidah sebagai pemimpin pengganti Rasulullah. Akan tetapi suku Aus belum menjawab pandangan tersebut.

Terjadilah perdebatan yang cukup panas antarkeduanya kaum tersebut, ditengah perdebatan itupun Abu Bakar pun menyampaikan sebuah pidato, dimana dalam pidatonya ia menyampaikan kelebihan-kelebihan kaum Muhajirin dan Anshar. Kemudian Abu Bakar mengusulkan agar mereka memilih salah satu dari sahabat yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah untuk menjadi pemimpin pengganti Nabi (Aziz & Fatimah, 2018). Setelah pidato itu selesai dan perdebatan sengit antarkeduanya kaum, maka terpilihlah Abu Bakar sebagai Khalifah pengganti Rasulullah.

Pengangkatan Khalifah Umar Ibn Khattab

Abu Bakar wafat pada tahun 634 M atau 13 H dan melepaskan jabatan kepemimpinannya, namun sebelum ia meninggal dunia ia menunjuk Umar Ibn Khattab sebagai penggantinya. Hal ini mendorong Abu Bakar untuk melakukannya walau hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, karena selalu dilakukan dengan cara bermusyawarah.

Namun, Abu Bakar melakukan hal ini karena beberapa alasan. Pertama, dia khawatir peristiwa yang sangat menegangkan kembali terulang di Tsaqifah Bani Sa'idah yang hampir memecah belah umat Islam kala itu. Kedua, kaum Muhaqiqin dan Anshar berdebat tentang hak mereka untuk menjadi khalifah. Ketiga, umat Islam baru saja membunuh mereka yang murtad dan menentang. Di saat yang sama, sebagian dari pasukan mujahidin sedang melakukan pertempuran sengit di luar kota Madinah melawan tentara Persia dan Romawi (Aziz & Fatimah, 2018).

Perlu digaris bawahi bahwa Abu Bakar memilih Umar Ibn Khattab juga berdasarkan saran dan pengamatannya. Selama masa sakitnya, khalifah Abu Bakar secara rahasia melakukan penilaian terhadap tokoh-tokoh penting dari kalangan rekannya mengenai orang yang paling cocok untuk menggantikan posisinya. Umar ibn al-Khattab dipilih untuk menggantikannya sebagai pemimpin (Zainudin, 2015). Khalifah kedua itu adalah khalifah pertama yang menerima gelar amir al-mukminin, panglima orang-orang beriman, sebagai panglima tertinggi pasukan Islam.

Pengangkatan Khalifah Ustman Bin Affan

Berbeda dengan cara Abu Bakar maupun Umar saat diangkat menjadi khalifah yang kedua dan ketiga, Ustman melalui proses yang berbeda. Utsman dipilih melalui proses bersama orang-orang yang namanya juga telah ditetapkan oleh Umar sebelum dia meninggal. Orang-orang yang dipilih oleh Umar karena pertimbangan setelah terjadinya penimakan kepada Umar pada pertengahan tahun kesebelas oleh seorang Persia bernama Fairuz, ia juga dikenal sebagai Abu Lu'lu'ah, ia menikam Umar enam kali. Setelah itu, sejumlah orang penting dalam masyarakat meminta Umar untuk menunjuk khalifah selanjutnya secara segera karena mereka khawatir bahwa Umar akan wafat karena luka-lukanya. Mereka khawatir bahwa jika Umar sampai wafat tanpa menunjuk pengganti segera, maka umat akan terpecah belah.

Para sahabat Umar pun menyarankan untuk menunjuk seorang putranya yaitu Abdulllah bin Umar, namun Umar menolaknya dengan keras. Karena terus di desak oleh para sahabat untuk menghindari perpecahan akhirnya Umar pun menyebutkan nama-nama para sahabat dan berpesan untuk memilih seorang dari mereka, mereka ialah: 'Ali bin Abi Thalib, 'Utsman bin 'Affan, Sa'ad bin Abi Waqqash, 'Abd al-Rahman bin 'Auf, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin 'Ubaidillah, serta 'Abdullah bin 'Umar, putranya, tetapi "tanpa hak suara." Umar memilih mereka yaitu karena mewakili setiap suku atau kelompok tertentu masa itu dan atas dasar pernyataan nabi bahwa kelak mereka adalah calon-calon penghuni surga (Shobirin et al., 2023).

Akhirnya terjadilah musyawarah yang diketuai oleh Abdurrahman ibnu Auf dan mereka berkumpul dalam satu rumah selama tiga hari, hingga jatuhlah pada pilihan antara Ali dan Utsman.

Abdurrahman mengajukan pertanyaan kepada kedua calon kuat yaitu, "apakah kamu sanggup mengembang tugas sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits?", Ali kemudian menjawab pertanyaan Abdurrahman bin Auf tentang kapasitasnya untuk mengembangkan tanggung jawab yang sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits jika ia dipilih sebagai khalifah. Dia menjawab bahwa dia berharap dapat melakukan apa yang ia bisa. Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Utsman, yang menjawab dengan tegas, "Ya! Saya sanggup." Berdasarkan jawabannya, Abdurrahman mengusulkan bahwa Utsman bin Affan akan diangkat menjadi khalifah ketiga dan bai'at (upacara pelantikan pemimpin) akan dilaksanakan segera setelah itu (Kadenun, 2021).

Pengangkatan Ali Bin Abi Thalib

Kegentingan di seluruh dunia Islampun terjadi usai terbunuhnya Khalifah Utsman masa itu. Pemberontak yang menguasai Madinah pada saat itu, mau tidak mau harus memilih Ali Bin Abi Thalib menjadi Khalifah selanjutnya. Saat itu, Ali mencoba menolak bai'at, tetapi Zubair Bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah memaksanya untuk melakukannya melihat situasi yang sudah tidak dapat direddam lagi. Hal tersebut pun membuat Ali menjadi satu-satunya khalifah yang dibai'at secara massal. Karena khalifah-khalifah sebelumnya dipilih dengan cara yang berbeda (Zainudin, 2015).

Pelantikan Ali Ibn Abi Thalib menjadi khalifah tidak seindah para khalifah sebelumnya, dikarenakan Ali dibai'at di tengah-tengah suasana berkabung atas meninggalnya Ustman Bin Affan. Mulanya Ali menolak untuk menjadi khalifah walaupun sudah beberapa kali diminta oleh kaum Anshar dan Muhajirin, dan Ali merupakan calon terkuat untuk menjadi Khalifah serta didukung oleh para sahabat. Namun, Ali meminta agar pemilihan khalifah dilakukan dengan musyawarah dan mendapat persetujuan dari para sahabat. Akan tetapi, karena kekhawatiran akan terjadinya persitiwa yang lebih mengerikan lagi ditengah-tengah situasi yang masih panas, maka Ali akhirnya bersedia dibai'at menjadi pengganti Khalifah umat Islam.

Kebijakan Pemerintahan Masa Khulafaur Rasyidin

Pada Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq

Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah merupakan awal terbentuknya pemerintahan model khilafah dalam sejarah Islam. Ia disebut lembaga pengganti kenabian dalam memelihara urusan agama dan mengatur urusan dunia untuk meneruskan pemerintahan Negara Madinah yang terbentuk di masa nabi Muhammad SAW (Shobirin et al., 2023). Dalam posisinya sebagai khalifah pertama, Abu Bakar menghadapi kondisi masyarakat sepeninggal Nabi Muhammad. Ia berkonsultasi dengan teman-temannya untuk mengatasi masalah. Ia dengan tegas menyatakan bahwa ia akan memerangi semua orang yang menyimpang dari kebenaran, seperti mereka yang murtad, tidak mau membayar zakat, dan mengaku nabi, agar semua orang kembali ke jalan yang benar. Hampir seluruh kaum muslimin menyambut tegasnya Abu bakar. Dibentuk sebelas pasukan untuk memerangi riddah atau kemurtadan ini. Sebelum pasukan dikirim ke wilayah yang dimaksud, terlebih dahulu dikirim surat yang meminta mereka untuk kembali menganut agama Islam. Namun, karena tidak mendapat sambutan yang baik, pasukan terpaksa dikirim untuk menumpasnya, dengan hasil yang luar biasa (Lubis, 2013).

Kepemimpinan Abu Bakar bersifat sentral atau terpusat, dengan khalifah mengontrol legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, Abu Bakar tetap melakukan musyawarah seperti Rasul saat menyelesaikan masalah. Langkah politik yang diambil Abu-Bakar sangat efektif dan menguntungkan (Setiyowati et al., 2021).

Kepatuhan dan ketaannya kepada Allah membuat Islam kala itu semakin besar, banyak usaha yang telah dilakukan Abu Bakar demi umat Islam, salah satu usaha Abu Bakar yang sangat berharga ialah kepiawaian tekadnya untuk menyalin dan menghimpun al-Qur'an ke dalam satu mushaf usai terjadinya perang melawan orang murtad. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya dua tahun saja. Meskipun hanya sebentar namun pada masa kepemimpinannya Abu Bakar sangat berdampak bagi umat Islam, ia telah menjalankan amanah sebagai pemimpin dengan maksimal dan memberikan manfaat bagi umat Islam.

Masa Umar Ibn Khattab

Kegiatan politik sangat stabil pada masa pemerintahan Umar dan usaha untuk memperluas wilayah Islampun berhasil dengan baik. Hal ini juga dikarenakan Umar yang cerdas mempelajari lalu mengadopsi sistem administrasi Persia yang lebih baik untuk negaranya sendiri. Delapan propinsi hadir dalam administrasi pemerintahan Umar Ibn Khtaab yang terdiri dari: Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Selama pemerintahan Umar bin Khatab, desentralisasi dimulai. Mulai dari masa Umar, pemerintahan dipimpin oleh pemerintahan pusat dan propinsi. Karena banyak wilayah telah dikuasai oleh Islam, administrasi pemerintahan harus diubah. Oleh karena itu, khalifah Umar membentuk lembaga pengadilan, di mana otoritas seorang hakim (yudikatif) terlepas dari otoritas badan pemerintahan (eksekutif). Hakim yang dipilih Umar harus orang yang dihormati, jujur, dan mulia. Zaid ibn Tsabit diangkat menjadi Qadhi Madinah, Ka'bah ibn Sur al-Azdi diangkat menjadi Qadhi Basrah, Ubadah ibn Shamit diangkat menjadi Qadhi Palestina, dan Abdullah ibn Mas'ud diangkat menjadi Qadhi Kuffah (Mubin, 2019).

Suatu lembaga formal yang dikenal sebagai lembaga penerangan dan pembinaan hukum islam juga mulai muncul pada masa Umar ibn Khatab. Saat ini juga terbentuk badan kemiliteran. Ekspansi Islam mencapai Arabia, syiria, Mesir, dan Persia pada masa khalifah Umar bin Khattab. Umar berusaha membangun pemerintah Islam dan undang-undang yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam seiring berkembangnya wilayah Islam.

Adapun susunan pemerintahan yang telah dibentuk oleh Umar, yaitu:

1. Kholifah (Amiril Mukminin), memiliki wewenang kekuasaan di Ibu Kota Madinah.
2. Wali (Gubernur), memiliki kekuasaan atas seluruh wilayah Provinsi.
3. Tugas Pokok Pejabat (Khalifah dan wali), yang menjadi imam sholat di masjid serta bertanggung jawab atas maju mundurnya Agama Islam dan Negara.
4. Dewan-dewan Negara yang berfungsi untuk menertibkan jalannya administrasi pemerintahan, mengatur dan menyimpan uang serta mengatur pemasukan dan pengeluaran uang negara, termasuk juga mencetak mata uang Negara (Mubin, 2019).

Masa Utsman bin Affan

Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung salam 12 tahun, pada awal pemerintahan Utsman semua kondisi pemerintahan baik-baik saja dan berjalan dengan lancar, namun pada tahun terakhir diwarnai dengan suasana yang kurang kondusif, masyarakat mulai terpecah menjadi dua kelompok, kelompok pertama ialah kelompok yang men-support Utsman sebagai Khalifah, kelompok kedua ialah kelompok yang menentang Utsman dan mendukung Ali sebagai Khalifah. Namun kelompok kedua ini tetap mengikuti arahan Utsman semata-mata untuk menyatukan keinginan mereka sebagai pendukung Ali (Lubis, 2013).

Dua hal utama yang terlihat dalam bidang hukum selama khalifah Utsman bin Affan adalah sebagai berikut: 1) Menjaga undang-undang dari masa Nabi Muhammad dalam bidang hukum, dan menaati apa yang ada di dalamnya; 2) Membangun sistem hukum baru untuk memperkuat pondasi negara Islam yang semakin luas dan menghadapi berbagai perubahan zaman 3) Menulis kembali Al-Qur'an (Rahmawati et al., 2015).

Walupun cukup banyak prestasi dan hasil jerih payah kepemimpinannya tak dihargai oleh masyarakatnya sendiri karena secercah kesalahan yang membuat masyarakat umat Islam menjadi tidak puas, kecewa dan berakhir tragis. Hal ini bermula saat Utsman mengangkat keluarganya (dari Bani Umayyah) sebagai pejabat yang memiliki kedudukan tinggi. Kredibilitas diri pemimpin yang baik sebagai alasan Utsman mengangkat keluarganya, namun pemikirannya tidak sejalan dengan pendapat para masyarakat, yang mengira ia melakukan nepotisme. Selain itu Utsman menekankan sistem kekuasaan sentralistik, yang menguasai seluruh pendapatan propinsi dan memilih seorang juru hitung dari keluarganya sendiri juga. Hal inilah yang semakin memicu pemberontakan umat Islam yang merasa kecewa dengan sistem pemerintahannya.

Pendapat lainnya mengungkapkan Marwah bin Hakim diangkat menjadi khalifah oleh Utsman. Masyarakat umat Islam beropini bahwa Utsman bertindak seperti boneka di hadapan kerabatnya setelah banyak anggota keluarganya memegang posisi penting. Dia terlalu lemah terhadap keluarganya dan tidak dapat melakukan apa-apa. Selain itu, dia tidak tegas terhadap kesalahan yang dilakukan oleh bawahan. Utsman sendiri tidak mengontrol bagaimana kekayaan negara yang dibagi-bagikan antara keturunannya. Hal ini jelas tidak dapat dibenarkan begitu saja, terlepas dari lemah lembutnya dan usianya yang lanjut, begitulah kiranya opini umat Islam kala itu, yang akan memicu akhir yang sangat tragis bagi pemimpinnya, yaitu Utsman Ibn Affan.

Karena hal itu, banyak orang Muslim meninggalkan Ustman kecuali keluarganya. Kesetiaan pejabat kepada Usman mulai berkurang, sehingga hanya kerabatnya yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, banyak pejabat dipecat dan digantikan oleh ahli keluarga mereka. Pada saat itu, lawan politiknya menuduh dia melakukan nepotisme. Selain itu, ia menghina rekan kerja, menyalahgunakan wewenang atas tuduhan itu, dan menggunakan uang negara secara tidak adil. Meskipun demikian, Usman menyatakan bahwa ia tidak mengambil apa pun dari kekayaan negara dan memberikannya kepada kerabatnya sebagai harta pribadinya (Lubis, 2013).

Hingga akhirnya memicu pemberontakan di Madinah dan daerah arab lainnya yang menyerbu rumah khalifah dan menyebabkan Ustman terbunuh. Kematian Ustman dengan cara tersebut menyebabkan kekacauan di kalangan umat muslimin hingga mengakibatkan ribuan pemudapan telah menjadi korban.

Pada Masa Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib bertanggung jawab sebagai khalifah selama enam tahun. Setelah pengangkatannya sebagai khalifah, tugas pertama Ali adalah menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar untuk menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah diberikan Usman kepada kaum kerabatnya sebagai milik negara. Ali juga menurunkan gubernur yang tidak disukai publik.

Terdapat kebijakan politik yang dilakukan Ali pada masa pemerintahannya, yaitu Ali mengembalikan kepercayaan Bani Umayah terhadap Baitul Mal, mengembalikan tanah negara yang telah diberikan kepada keluarga Utsman selama pemerintahannya,, mengganti gubernur yang tidak disukai oleh masyarakat dengan pejabat yang lebih kompeten, Ali juga membangun arsip negara, menyelamatkan dokumen khalifah, mendirikan kantor hajib (bendaharawan), membangun kantor pasukan pengawal, dan mengatur dan mengatur tugas polisi, Ali juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam, antara lain dengan menyerbu Koukan (Bombay) dari laut dan membangun benteng yang berdiri di utara perbatasan Persia (Kadenun, 2021).

Aisyah, Thalhah, dan Zubair memulai oposisi terbuka terhadap Khalifah, walau mereka mulanya adalah pendukung Ali dan sangat kuat tekadnya memilih Ali sebagai khalifah, tapi memang keadilah harus ditegakkan ucap mereka. Mereka menuntut Ali untuk menghukum para pembunuh Utsman, tetapi Ali tidak dapat memenuhi tuntutan mereka karena dua alasan:

1. Memulihkan ketertiban dan mengonsolidasikan kedudukan kekhalifahan adalah tugas utama yang harus dilakukan dalam situasi kritis dan penuh intimidasi seperti saat itu.
2. Menghukum para pembunuh bukanlah tugas yang mudah. Banyak orang dari Mesir, Irak, dan Arab secara langsung terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman.

Sebenarnya, Khalifah Ali ingin menghindari konflik dan konflik. Ali meminta Thalhah dan Zubair untuk berunding untuk menyelesaikan masalah secara damai. Namun, mereka menolak ajakan itu. Pertempuran mengerikan pun akhirnya terjadi. Perang ini disebut sebagai “perang jamal (unta)” karena Aisyah menunggangi unta dan Ali berhasil mengalahkan mereka. Zubair dan Thalhah tewas ketika mereka hendak melarikan diri. Sementara itu, Aisyah ditangkap dan dikembalikan ke Madinah.

Selain itu, kebijakan Ali memicu perlawaan dari gubernur Damaskus, Mu'awiyah, yang didukung oleh bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kekuatan dan kedudukan mereka. Setelah mengalahkan Zubair dan teman-temannya, Ali kemudian berangkat ke Kuffah dan menuju Damaskus dengan banyak tentaranya. Di siffin, pasukan dia bertemu dengan pasukan Mu'awiyah. Selanjutnya, pertempuran terjadi di wilayah ini, yang menyebabkan peristiwa perang siffin. Arbitrase mengakhiri

peperangan, tetapi tidak menyelesaikan masalah. bahkan melibatkan pihak ketiga. Dengan kata lain, Al- Khawarij adalah orang-orang yang keluar dari Ali, dan dengan munculnya kelompok ini, tentara Ali semakin lemah, sementara posisi Mu'awiyah semakin kuat. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Ramadhan 40 H (660 M), seorang anggota kelompok khawarij Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali saat sedang salat subuh di Masjid Agung Kufah (Afandi, 2018).

Kesimpulan dan Saran

Proses Pengangkatan Khulafaur Rasyidin tidak terdapat satu pola yang baku mengenai cara pengangkatan khalifah karena setiap Khalifah memiliki proses pengangkatan yang berbeda-beda. Praktik pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin pula terdapat pola politik pemerintahan yang berbeda-beda juga dan memiliki kekuatan masing-masing. Selama periode empat Khalifah, agama Islam berkembang dengan sukses dalam waktu yang singkat. Dalam waktu kurang dari lima puluh tahun, negara-negara yang jauh dari pusat kekuasaan Islam dapat berkembang. Ini adalah kemenangan yang luar biasa bagi negara yang belum memiliki pengalaman politik yang kuat. Karena mereka jujur, adil, bijaksana, sederhana, dan mengutamakan rakyat, Khulafaur Rasyidin patut dicontoh. Nabi Muhammad Saw, bersama dengan empat Khalifah, adalah pemimpin yang sempurna dan harus diteladani dalam sistem pemerintahan. Kita berharap sistem pemerintahan Indonesia dapat mengikuti jejak mereka.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. M. N. (2019). *Manhaj Al-Khulafa'urrasyidin Fi Ldarah as-Daulah Al-Islamiyah*, Terj. Sistem Pemerintahan Khulafaur Rasyidin (A. Rosyad (ed.)). Pusat Al-Kautsar.
- Afandi. (2018). Khulafaur Rasyidin Dan Anatomi-Dialektik Pendidikan Politik Penguasa. *Al-Ibrah*, 3, 31–33.
- Aziz, M., & Fatimah, S. (2018). *Sejarah Peradaban Islam* (Cetakan Pe). FEBI UIN-SU Press.
- Fahira Iramadhania, Yuan Amelia Tri Ananda, Tri Hartanti, & Zulham Zulham. (2023). Peradaban Islam Pada Masa Pemerintahan Khulafaur Rasyidin. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 67–78. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v3i1.2582>
- Kadenun, K. K. (2021). Proses Peralihan Kekuasaan Dan Kebijaksanaan Dalam Pemerintahan Khulafaurrasyidin. *AL-MIKRAJ : Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN: 2745-4584), 1(2), 1–27. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v1i2.747>
- Lubis, J. (2013). Kontribusi Peradaban Islam Masa Khulafaurrasyidin: Pembentukan Masyarakat Politik Muslim. *Pekan Baru*, 17(1), 48–57. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/alidarah/article/view/4839/pdf>
- Mubin, F. (2019). *Khulafaur rasyidin*. 1(3), 418–440.
- Rahmawati, N., Sugiyanto, & Suranto. (2015). Sistem Pemerintahan Islam Di Bawah Kepemimpinan Khalifah Utsman Bin Affan Tahun 644-656. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1–12.
- Setiyorwati, A., Putri, C. J., Jannah, F. M., & As'ad, M. R. (2021). Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali

- bin Abi Thalib). *Yasin*, 1(2), 262–274. <https://doi.org/10.58578/yasin.v1i2.132>
- Shobirin, Rofiq, A., & Imron, A. (2023). *Interpretasi Fiqh Siyasah Pemerintahan Islam*. 17, 293–330.
- Yunus, M. (2016). Konsepsi Politik Islam Klasik (Suksesi Kepemimpinan Muhammad SAW dan Khulafa' ArRasyidin). *Palapa*, 4(2), 72–84.
<https://doi.org/10.36088/palapa.v4i2.25>
- Zainudin, E. (2015). Peradaban Islam pada Masa Khulafah Rasyidin. *Jurnal Intelelegensi*, 03(01), 50–58. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JI/article/download/1337/1345>